

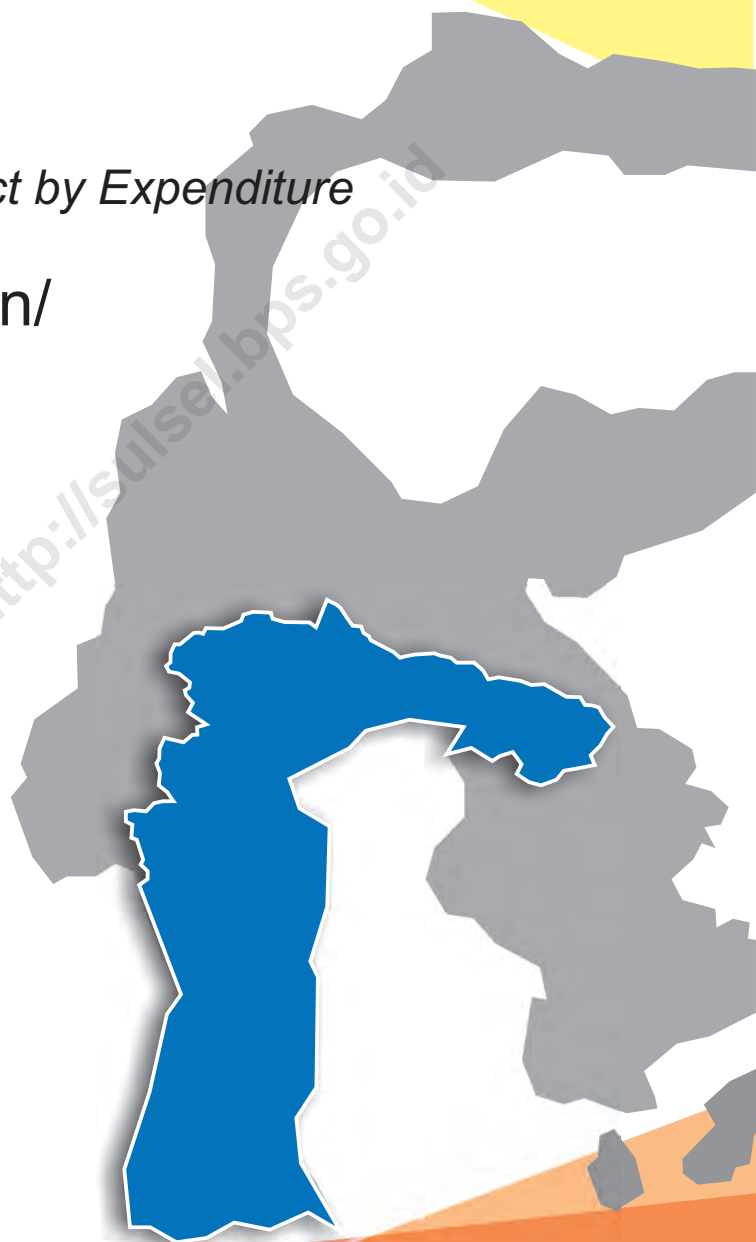
# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*

Provinsi Sulawesi Selatan/  
*Province of Sulawesi Selatan*

**2010-2014**

<http://sulsew.bps.go.id>





**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
MENURUT PENGELUARAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
2010 - 2014**

<http://sulsel.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
MENURUT PENGELUARAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2010- 2014**

Nomor Publikasi : 73552.1501  
Katalog BPS : 9302002.73

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 80 halaman

Naskah:  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://susel.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, 1 Juli 2015

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Selatan,



Nursam Salam, SE



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik .....	vii
Daftar Lampiran .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1.  Pengertian Pendapatan Regional .....	3
1.2.  Kegunaan Statistik Pendapatan Regional .....	4
BAB II    METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....	7
2.1  Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	9
2.2  Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	11
2.3  Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	14
2.4  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	16
2.5  Perubahan Inventori .....	20
2.6  Ekspor Impor .....	24
BAB III    TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PDRB  PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010-2014.....	27
3.1  Tinjauan Agregat PDRB Sulawesi Selatan  Menurut Pengeluaran...	29
3.2  Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	34
3.3  Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	38
3.4  Konsumsi Akhir Pemerintah .....	39
3.5  Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	43
3.6  Perkembangan Perubahan Inventori .....	44
3.7  Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri .....	46
3.8  Perkembangan Impor  Barang dan Jasa Luar Negeri .....	48
3.9  Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah .....	50

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010-2014 .....	51
	4.1 PDRB (Nominal) .....	53
	4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	54
	4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	55
	4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB .....	56
	4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB .....	57
	4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor .....	58
	4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan .....	59
	4.8 Neraca Perdagangan ( <i>Trade Balance</i> ) .....	60
	4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI) .....	62
	4.10 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) .....	63
BAB V	PENUTUP .....	65
	LAMPIRAN .....	69
	DAFTAR PUSTAKA .....	77



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 .....	29
Tabel 02. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014.....	30
Tabel 03. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014 .....	31
Tabel 04. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014.....	32
Tabel 05. Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	33
Tabel 06. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	34
Tabel 07. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	36
Tabel 08. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	36
Tabel 09. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	37
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	38
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	39
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	41
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	43
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	45
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	46
Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	48
Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi	

	Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	53
Tabel 18.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014.....	54
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010 – 2014.....	55
Tabel 20.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	56
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014.....	57
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014 .....	58
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014.....	59
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014.....	60
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	62
Tabel 26.	Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	63

<http://sulsel.bps.go.id>

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 01. Perbandingan PDRB <i>adhb</i> dan <i>adhk</i> 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014.....	31

<http://sulsel.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 01. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan.....	71
Tabel 02. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan .....	72
Tabel 03. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan.....	73
Tabel 04. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan.....	74
Tabel 05. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan.....	75
Tabel 06. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan .....	76

<http://sulsel.bps.go.id>

***BAB I***  
***PENDAHULUAN***



## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa

tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## 1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.



7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<http://sulsel.bps.go.id>



***BAB II***  
***METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA***

<http://sulselbpps.go.id>



## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran

## 7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## iv. Penghitungan PKRT Tahunan

### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,

- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

## 2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu  $\times (30/7) \times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan  $\times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang

tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

## ii Konsep dan definisi

LNPRRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

## iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.



- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

#### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

##### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

##### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$  : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak

lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

### iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

### iv. Penghitungan PDRB Tahunan

#### 1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

#### 2. Metode Penghitungan

##### a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

#### **b. PK-P Provinsi adh Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## **2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

### **i Pendahuluan**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### **ii Konsep dan definisi**

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### iii Cakupan

#### PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

### iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
  - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
  - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
  - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
  - d. Laporan keuangan perusahaan.
  - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
  - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
  - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
  - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
  - i. Publikasi Statistik Konstruksi.

- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

### 3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

#### Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

#### Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai

tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

*Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena



menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

#### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;

- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

## 2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang

sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

<http://sulsel.bps.go.id>

## 2.6. EKSPOR IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut  
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah
  - Impor antar daerah

### iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

#### 1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;

- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

## 2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



**BAB III**

**TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PDRB  
PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2010 - 2014**

<http://sulsul.bps.go.id>





Perubahan struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

### 3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB SULAWESI SELATAN MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan kondisi yang relatif stabil dari tahun 2010-2014, meskipun dalam dua tahun terakhir terlihat sedikit melemah. PDRB Sulawesi Selatan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan arah yang positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
2. Konsumsi LNPR	2.077,10	2.313,83	2.601,07	3.083,42	3.863,84
3. Konsumsi Pemerintah	20.578,07	23.491,34	26.124,21	28.718,94	31.695,13
4. PMTB	57.259,19	66.698,22	82.677,07	96.604,57	118.364,52
5. Perubahan Inventori	2.105,97	2.498,38	5.661,43	6.394,99	-1.550,67
6. Ekspor Luar Negeri	22.971,62	18.704,08	17.035,86	18.749,51	21.723,59
7. Impor Luar Negeri	10.394,14	13.458,92	13.500,01	15.332,78	10.961,42
8. Net Ekspor Antar Daerah	-22.518,18	-15.505,07	-22.002,11	-28.657,16	-37.692,74
Total PDRB	171.740,74	198.289,09	228.285,47	258.682,96	300.124,26

Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku (*adhb*) selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

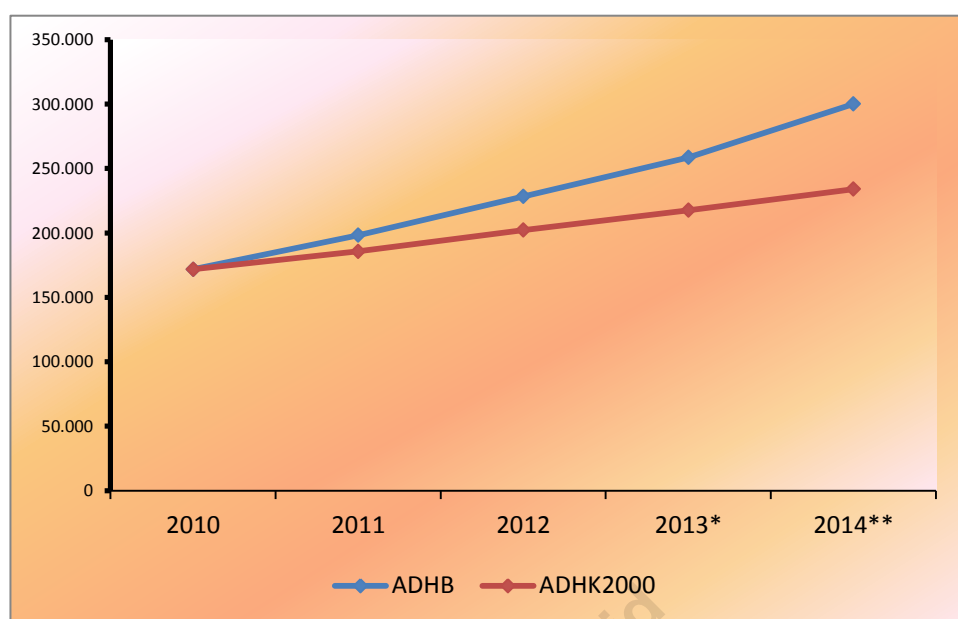
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2010-2014**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	99.661,111	106.351,16	113.778,97	120.561,21	127.699,98
2. Konsumsi LNPRT	2.077,10	2.217,83	2.376,28	2.622,46	2.917,64
3. Konsumsi Pemerintah	20.578,07	21.545,39	22.451,03	23.057,70	23.491,72
4. PMTB	57.259,19	64.561,92	74.678,05	84.528,48	92.471,79
5. Perubahan Inventori	2.105,97	2.163,70	5.431,19	5.452,37	-1.375,15
6. Ekspor Luar Negeri	22.971,62	17.333,11	15.533,44	16.458,16	18.071,27
7. Impor Luar Negeri	10.394,14	12.003,48	11.106,03	12.418,05	7.973,67
8. Net Ekspor Antar Daerah	-22.518,18	-16.461,15	-20.958,33	-22.643,88	-21.219,61
Total PDRB	171.740,74	185.708,47	202.184,59	217.618,45	234.083,97

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (*adhk*) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan *adhk*, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran *adhk* menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan berdasarkan PDRB *adhk* dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB *adhb*, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB *adhk* juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB *adhb* dan *adhk* 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB *adhb* selalu lebih besar dari nilai PDRB *adhk*. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB *adhb*. Dalam PDRB *adhk* pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58,03	57,26	56,81	57,65	58,20
2. Konsumsi LNPRT	1,21	1,17	1,14	1,19	1,29
3. Konsumsi Pemerintah	11,98	11,85	11,44	11,10	10,56
4. PMTB	33,34	33,64	36,22	37,34	39,44
5. Perubahan Inventori	1,23	1,26	2,48	2,47	-0,52
6. Ekspor Luar Negeri	13,38	9,43	7,46	7,25	7,24
7. Impor Luar Negeri	6,05	6,79	5,91	5,93	3,65
8. Net Ekspor Antar Daerah	-13,11	-7,82	-9,64	-11,08	-12,56
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 33 -39 persen. Di sisi lain, perdagangan internasional Sulawesi Selatan yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor luar negeri dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor luar negeri cenderung lebih tinggi dari nilai impor luar negeri. Kecenderungan perdagangan internasional Sulawesi Selatan dalam periode 2010-2014 selalu menunjukkan posisi “surplus”. Jika melihat ekspor secara keseluruhan (ekspor luar negeri ditambah ekspor antar daerah) juga mempunyai peran yang relatif besar, karena mempunyai kontribusi sekitar 22-34 persen terhadap PDRB; demikian halnya impor secara total masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 32-39 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 10,56 – 11,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010  
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2010 – 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	6,71	6,98	5,96	5,92
2. Konsumsi LNPRT	-	6,78	7,14	10,36	11,26
3. Konsumsi Pemerintah	-	4,70	4,20	2,70	1,88
4. PMTB	-	12,75	15,67	13,19	9,40
5. Perubahan Inventori	-	2,74	151,01	0,39	-125,22
6. Ekspor Luar Negeri	-	-24,55	-10,38	5,95	9,80
7. Impor Luar Negeri	-	15,48	-7,48	11,81	-35,79
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-26,90	27,32	8,04	-6,29
Total PDRB	-	8,13	8,87	7,63	7,57

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 - 2014 secara rata-rata mencapai 8,05 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 8,13 persen (2011); 8,87 persen (2012); 7,63 persen (2013); dan 7,57 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 8,87 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (7,57 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	106,77	113,98	123,69	136,79
2. Konsumsi LNPRT	100,00	104,33	109,46	117,58	132,43
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	109,03	116,36	124,55	134,92
4. PMTB	100,00	103,31	110,71	114,29	128,00
5. Perubahan Inventori	100,00	115,47	104,24	117,29	112,76
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	107,91	109,67	113,92	120,21
7. Impor Luar Negeri	100,00	112,13	121,56	123,47	137,47
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	94,19	104,98	126,56	177,63
Total PDRB	100,00	106,77	112,91	118,87	128,21

Sementara itu, indeks implisit<sup>1</sup> PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

<sup>1</sup> Indeks perkembangan

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	99.661,11	106.351,16	113.778,97	120.561,21	127.699,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	58,03	57,26	56,81	57,65	58,20
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/tahun ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	53.756,91	60.532,15	68.354,63	77.734,92	90.091,58
b. ADHK 2010	53.756,91	56.695,91	59.969,91	62.846,86	65.860,79
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	12.364,29	13.921,76	15.719,75	17.875,98	20.716,06
b. ADHK 2010	12.364,29	13.039,46	13.791,39	14.452,32	15.144,33
Pertumbuhan <sup>2</sup>					
a. Total konsumsi RT	-	6,71	6,98	5,96	5,92
b. Per-RT	-	5,47	5,77	4,80	4,80
c. Perkapita	-	5,46	5,76	4,79	4,78
Jumlah RT ( <i>unit</i> )	1.853.922	1.875.817	1.897.281	1.918.333	1.938.938
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	8.060,4	8.156,1	8.250	8.342	8.432,2

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adhb*) maupun riil (*adhk*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 - 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 58,20 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 56,81 persen.

Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adhb* maupun *adhk* 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Sulawesi Selatan menghabiskan dana sekitar 53.756,91 ribu rupiah setahun untuk membiayai

<sup>2</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 60.532,15 ribu rupiah (2011); 68.354,63 ribu rupiah (2012); 77.734,92 ribu rupiah (2013); dan menjadi 90.091,58 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan *adhk* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 6,39 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,98 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik *adhb* maupun *adhk* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” berkisar antara 4,78 - 5,76 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adhk* sebesar 6,71 persen pada tahun 2011. Kemudian, meningkat pada tahun berikutnya yaitu sebesar 6,98 persen (2012). Selanjutnya melemah menjadi 5,96 persen (2013) dan 5,92 persen (2014). Sementara itu, konsumsi perkapita mengalami peningkatan dari 5,46 persen ditahun 2011 menjadi sebesar 5,76 persen di tahun 2012 . Namun pada tahun berikutnya (2013 dan 2014) melemah menjadi 4,79 persen dan 4,78 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014<sup>3</sup>**

(Persen)					
Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	45,94	44,35	44,09	43,62	43,15
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,19	4,62	4,65	4,81	4,90
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,40	9,67	9,66	9,97	10,12
d. Kesehatan & Pendidikan	9,21	9,97	10,20	10,08	10,29
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,41	21,95	21,73	22,06	21,76
f. Hotel & Restoran	4,65	4,95	5,19	5,03	5,27
g. Lainnya	4,18	4,45	4,46	4,39	4,47
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2010 - 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Sulawesi Selatan, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 45,94 persen (2010) ; 44,35 persen (2011) ; 44,09 persen (2012) ; 43,62 persen (2013) ; dan 43,15 persen (2014).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

(Persen)					
Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	5,11	6,39	5,73	5,69
b. Pakaian dan Alas Kaki	-	7,02	8,32	7,34	7,64
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	5,44	6,68	5,17	6,28
d. Kesehatan & Pendidikan	-	9,23	10,65	5,99	6,09
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	7,79	6,50	6,59	5,77
f. Hotel & Restoran	-	9,80	8,06	7,27	7,90
g. Lainnya	-	12,15	5,90	3,94	4,00

<sup>3</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB )



Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 8,08 persen (2011) ; 7,48 persen (2012) , 6,15 persen (2013), dan 6,11 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014<sup>4</sup>**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	4,65	6,72	7,62	9,64
b. Pakaian dan Alas Kaki	-	17,33	6,11	10,82	10,87
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	11,16	6,95	12,81	11,97
d. Kesehatan & Pendidikan	-	13,00	5,51	7,26	12,76
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	3,54	6,15	9,54	9,22
f. Hotel & Restoran	-	10,57	10,71	4,01	13,65
g. Lainnya	-	8,25	8,15	8,86	14,61

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2010, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 4,65 persen (2011); 6,72 persen (2012); 7,62 persen (2013); dan 9,64 (2014). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari 17,33 persen (2011) menjadi 6,11 persen di tahun 2012. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu; 10,82 persen (2013); dan 10,87 persen (2014).

<sup>4</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	2.077,10	2.313,83	2.601,07	3.083,42	3.863,84
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	2.077,10	2.217,83	2.376,28	2.622,46	2.917,64
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,21	1,17	1,14	1,19	1,29

Secara umum, walaupun proporsi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB cukup kecil, namun rata-rata konsumsi LNPRT di Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adhb* maupun *adhk* 2010. Pengeluaran Konsumsi LNPRT menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 1,29 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 1,14 persen.

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	20.578,07	23.491,34	26.124,21	28.718,94	31.695,13
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	20.578,07	21.545,39	22.451,03	23.057,70	23.491,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	11,98	11,85	11,44	11,10	10,56
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2.552,98	2.880,21	3.166,57	3.758,82	3.758,82
b. ADHK 2010	2.552,98	2.641,63	2.721,34	2.764,05	2.785,95
Konsumsi Pemerintah per pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	99.038,75	113.977,52	129.671,87	144.737,40	155.155,32
b. ADHK 2010	99.038,75	104.535,97	111.439,41	116.205,97	114.997,67
Pertumbuhan <sup>5</sup>					
a. Total konsumsi pemerintah	-	4,70	4,20	2,70	1,88
b. Konsumsi perkapita	-	3,47	3,01	1,56	0,79
c. Konsumsi per pegawai	-	5,55	6,60	4,28	-1,04
Jumlah Pegawai Pemerintah <sup>6</sup>	207.778	206.105	201.464	198.421	204.280
Jumlah penduduk (000 org)	8.060,4	8.156,1	8.250	8.342	8.432,2

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adhb* maupun *adhk* 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adhb* sebesar 20.578,07 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 31.695,12 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adhk* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa secara proporsi, pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan, dari 11,98 persen ditahun 2010 menjadi 10,56 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2014; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2010. Penurunan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

<sup>5</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

<sup>6</sup> Tidak termasuk polisi dan militer

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah perkapita *adhb* sebesar 2.552,98 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita *adhk* 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Walaupun dari segi nilai, konsumsi pemerintah perkapita terus meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatannya tidak cukup tinggi, atau dapat dikatakan melambat, hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 3,47 persen pada tahun 2011, dan terus melambat menjadi 3,01 persen di tahun berikutnya (2012), hingga menjadi 0,79 persen di tahun 2014.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah *adhb* menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 99.038,75 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 155.155,32 ribu rupiah di tahun 2014 (lihat tabel 11). Sementara itu, pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah *adhk* menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2010 hingga 2013 kemudian menurun di tahun 2014. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,60 persen, dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2014 yaitu minus 1,04 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik *adhb* maupun *adhk* 2010). Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 207.778 orang dan terus mengalami penurunan di tahun 2011, 2012 hingga 2013 sebesar 206.105 pegawai, 201.464 pegawai, dan 198.421 pegawai. Kemudian naik kembali menjadi 204.280 pegawai pada tahun 2014. Dalam kurun waktu 2010 - 2014, secara total terjadi pengurangan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 3.498 orang atau turun sebesar minus 1,68 persen dari tahun 2010. Penurunan tersebut disebabkan karena pegawai yang pensiun, meninggal, maupun kebijakan pemerintah seperti moratorium pegawai.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun

2011 dan terus mengalami perlambatan hingga tahun 2014 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun 2011 sebesar 4,70 persen dan 1,88 persen di tahun 2014; untuk konsumsi per kapita 3,47 persen di tahun 2011 dan 0,79 persen di tahun 2014; sedangkan untuk konsumsi per pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 6,60 persen, sedangkan terendah ditahun 2014 yaitu -1,04 persen.

**Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah <sup>7</sup>					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	11.715,02	13.515,20	14.952,87	16.395,84	18.055,42
(%)	56,93	57,53	57,24	57,09	56,97
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	8.863,05	9.9761,34	11.171,35	12.323,10	13.639,71
(%)	43,07	42,46	42,76	42,91	43,03
Total Konsumsi (Miliar Rp)	20.578,07	23.491,34	26.1242,13	28.718,94	31.695,13
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (adhk 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	-	9,23	3,10	2,69	1,22
b. Konsumsi Individu	-	-1,29	5,81	2,71	2,83
Total Konsumsi	-	4,70	4,20	2,70	1,88
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit <sup>8</sup>					
a. Konsumsi Kolektif	-	5,62	7,31	6,77	8,80
b. Konsumsi Individu	-	14,03	5,83	7,39	7,64
Total Konsumsi	-	9,03	6,72	7,04	8,32

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Di atas 50 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 10). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya mencapai 56,93 persen dan pada tahun 2011 naik menjadi 57,53 persen. Kemudian berturut-turut turun pada tahun 2012, 2013, dan 2014 turun menjadi 57,24 persen, 57,09 persen, dan 56,97 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 10). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2010 - 2014 juga cenderung meningkat (berlawanan dengan proporsi kolektif). Hanya pada tahun 2011 saja proporsinya menurun menjadi 42,47 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

<sup>8</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

pemerintah mengalami penurunan secara gradual dari yang sebesar 207.778 orang (2010) menjadi 204.280 orang (2014). Sementara itu jumlah penduduk meningkat dari sejumlah 8.060.400 orang pada tahun 2010 menjadi 8.432.163 orang pada tahun 2014. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung meningkat meskipun di tahun 2014 sedikit menurun, dengan masing-masing adalah 38,79 (2010), 39,57 (2011), 40,95 (2012), 42,04 (2013), dan 41,28 (2014). Hal ini berarti pada tahun 2010 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 38 penduduk, dan maka pada tahun 2014 menjadi sekitar 41 penduduk.

<http://sulsel.bps.go.id>

### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>9</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	57.259,19	66.698,23	82.677,07	96.604,57	118.364,52
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	57.259,19	64.561,92	74.678,05	84.528,48	92.471,79
Proporsi terhadap PDRB (%)	33,34	33,64	36,22	37,34	39,44
Struktur PMTB <sup>10</sup>					
a. Bangunan ( <i>Miliar Rp</i> )	46.779,42	54.781,20	68.608,45	79.869,61	96.805,85
(%)	81,70	82,13	82,98	82,68	81,79
b. Non Bangunan ( <i>Miliar Rp</i> )	10.479,77	11.917,02	14.068,62	16.734,96	21.558,66
(%)	18,30	17,87	17,02	17,32	18,21
Total PMTB ( <i>Miliar Rp</i> )	57.259,19	66.698,23	82.677,07	96.6045,65	118.364,52
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan <sup>11</sup> (%)					
a. Bangunan	-	12,49	16,69	12,98	7,87
b. Non Bangunan	-	13,94	11,16	14,17	16,37
Total PMTB	-	12,75	15,67	13,19	9,40

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 mengalami fluktuasi dari 12,75 persen di tahun 2011, menjadi 15,67 persen di tahun 2012 kemudian melambat menjadi 13,19 persen (2013) dan 9,40 persen (2014). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Di atas 80 persen PMTB berasal dari sub komponen bangunan. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2011 sebesar 12,49 persen, dan meningkat lagi cukup tinggi menjadi 16,69 persen di tahun 2012. Pada tahun 2013, sub komponen bangunan mengalami perlambatan kembali yaitu menjadi 12,98 persen, dan melambat cukup drastis menjadi 7,87 persen di tahun 2014. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010 - 2014 (tabel 11).

<sup>9</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

<sup>10</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB )

<sup>11</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan juga menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2010 - 2014 pertumbuhan non bangunan cenderung meningkat, meskipun melambat di tahun 2012 yaitu dari 13,94 persen di tahun 2011 menjadi 11,16 persen di tahun 2012. Namun meningkat kembali di tahun berikutnya yaitu 14,17 persen di tahun 2013 dan kembali menguat menjadi 16,37 persen di tahun 2014.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 15,67 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 9,40 persen.

<http://sulsel.bps.go.id>



### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	2.105,97	2.498,38	5.661,43	6.394,99	-1.550,67
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	2.105,97	2.163,70	5.431,19	5.452,37	-1.375,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,23	1,26	2,48	2,47	-0,52

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2010 perubahan inventori sebesar 2.105,97 miliar rupiah. Sedangkan tahun 2011 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 2.498,38 miliar rupiah, tahun 2012 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 5.661,43 miliar, tahun 2013 perubahan inventori kembali meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.394,99 miliar rupiah, dan pada tahun 2014 perubahan inventori menurun drastis sebesar minus 5.722,85 miliar rupiah .

### 3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor LN					
a. ADHB (Miliar Rp)	22.971,62	18.704,07	17.035,86	18.749,51	21.723,58
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	22.971,62	17.333,11	15.533,43	16.458,15	18.071,26
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	13,38	9,43	7,46	7,25	7,24
Struktur Ekspor LN <sup>12</sup>					
a. Barang (Miliar Rp)	22.469,79	18.144,59	16.389,29	18.009,63	20.978,43
(%)	97,82	97,01	96,20	96,05	96,57
b. Jasa (Miliar Rp)	501,82	559,48	646,56	739,88	745,15
(%)	2,18	2,99	3,80	3,95	3,43
Total ekspor LN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan <sup>13</sup>					
- Barang	-	-25,28	-11,01	6,07	10,58
- Jasa	-	8,33	9,12	3,08	-10,47
Total ekspor LN	-	-24,55	-10,38	5,95	9,80

Secara total, nilai ekspor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan tahun 2014 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2012, ekspor sempat mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011, nilai ekspor barang dan jasa luar negeri mencapai 18.704,07 miliar rupiah turun dari tahun 2010 yang mempunyai nilai 22.971,62 miliar rupiah. Tahun 2012 ekspor barang dan jasa luar negeri sebesar 17.035,86 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai ekspor barang dan jasa luar negeri kembali meningkat yaitu menjadi 18.749,51 miliar rupiah (2013), dan meningkat kembali menjadi 21.723,58 miliar rupiah pada tahun 2014. Sejalan dengan nilai ekspor ekspor barang dan jasa luar negeri *adhb*, nilai ekspor ekspor barang dan jasa luar negeri *adhk* 2010 juga menurun di tahun 2011 dan 2012 dan mulai kembali meningkat di tahun 2013 dan 2014, dimana nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 22.971,62 miliar rupiah (2010); 17.333,11 miliar rupiah (2011); 15.533,43 miliar rupiah (2012); 16.458,15 miliar rupiah (2013); dan 18.071,26 miliar rupiah (2014). Selama kurun waktu 2010 - 2014, proporsinya ekspor barang

<sup>12</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

<sup>13</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

dan jasa luar negeri terhadap total PDRB semakin menurun, yaitu dari 13,38 persen pada tahun 2010 menjadi 7,24 persen di tahun 2014.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan berupa barang (rata-rata 96 persen), dan sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu -24,55 persen (2011) dan -10,38 persen (2012). Tajamnya penurunan ekspor barang dan jasa luar negeri tersebut disebabkan adanya penurunan volume ekspor dalam bentuk barang, terutama komoditi-komoditi ekspor unggulan Sulawesi Selatan yaitu nikel dan kakao. Pertumbuhan ekspor barang luar negeri pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing minus 25,28 persen (2011) dan minus 11,01 persen (2012). Sedangkan pada dua tahun terakhir, ekspor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar 5,95 persen (2013) dan 9,80 persen (2014).

<http://sulsel.bps.go.id>

### 3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Sulawesi Selatan. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor LN					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	10.394,14	13.458,92	13.500,01	15.332,78	10.961,42
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	10.394,14	12.003,48	11.106,03	12.418,05	7.973,67
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,05	6,79	5,91	5,93	3,65
Struktur Impor LN <sup>14</sup>					
a. Barang ( <i>Miliar Rp</i> )	9.766,11	12.775,52	12.768,80	14.447,90	10.360,93
(%)	93,96	94,92	94,58	94,23	94,52
b. Jasa ( <i>Miliar Rp</i> )	628,03	683,40	731,21	884,87	600,50
(%)	6,04	5,08	5,42	5,77	5,48
Total impor LN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan <sup>15</sup>					
- Barang	-	15,87	-7,80	12,09	-35,44
- Jasa	-	9,45	-2,17	7,54	-41,47
Total impor LN	-	15,48	-7,48	11,81	-35,79

<sup>14</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

<sup>15</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Indonesia pada periode tahun 2010 - 2014 mengalami fluktuasi (baik *adhb* maupun *adhk* 2010). Untuk total nilai impor luar negeri *adhb* tertinggi pada tahun 2013 sebesar 15.332,78 miliar rupiah, dan terendah di tahun 2010 sebesar 10.394,14 miliar rupiah. Sedangkan nilai impor luar negeri berdasarkan harga konstan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana di tahun 2010 sebesar 10.394,13 miliar rupiah, naik menjadi 12.003,48 miliar rupiah di tahun 2011, turun menjadi 11.106,03 miliar rupiah di tahun 2012, kemudian naik kembali menjadi 12.418,05 miliar rupiah di tahun 2013, dan kembali turun secara drastis di tahun 2014 menjadi 7.973,67 miliar rupiah.

Proporsi impor barang dan jasa luar negeri pada tahun 2011 naik menjadi 6,79 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 6,05 persen. Namun mulai tahun 2012 sampai 2014 proporsinya terus menurun, yaitu 5,91 persen (2012), dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 5,93 persen, kemudian kembali turun menjadi 3,65 persen di tahun 2014.

Di sisi lain, pertumbuhan riil nilai impor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan berfluktuatif. Jika pada tahun 2011 tumbuh cukup signifikan di level 15,48 persen, di tahun 2012 turun sebesar minus 7,48 persen. Pertumbuhan impor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan kemudian naik kembali menjadi 11,81 persen di tahun 2013. Dan kembali berkontraksi sangat dalam di level minus 35,79 persen di tahun 2014. Hal ini disebabkan pertumbuhan impor barang maupun jasa luar negeri yang mengalami perlambatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar minus 35,44 persen untuk impor barang dan minus 41,47 persen untuk impor jasa.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 94,44 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

### 3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar wilayah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<http://sulsel.bps.go.id>

**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT**  
**PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2010 - 2014**





Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Miliar Rp</i> )					
- ADHB	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
- ADHK 2010	171.740,74	185.708,47	202.184,59	217.618,45	234.083,97
PDRB perkapita ( <i>Ribu Rp</i> )					
- ADHB	21.306,72	24.311,75	27.670,97	31.009,71	35.592,64
- ADHK 2010	21.306,72	22.769,27	24.507,22	26.087,08	27.760,72
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-	6,86	7,63	6,45	6,42
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	8.060,4	8.156,1	8.250	8.342	8.432,2
Pertumbuhan	-	1,19	1,15	1,12	1,08

PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 6 hingga 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,14 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

## 4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Sulawesi Selatan (sekitar 57 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Sulawesi Selatan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010–2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	58.537,97	57.263,30	58.192,48	57.690,73	72.679,53
<b>Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor</b>	<b>1,70</b>	<b>1,98</b>	<b>2,23</b>	<b>2,58</b>	<b>2,40</b>

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,70 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2013 (2,58) lebih disebabkan karena penurunan nilai ekspor, sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

### 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB  
Tahun 2010 – 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	57.259,19	66.698,23	82.677,07	96.604,57	118.364,52
<b>Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB</b>	<b>1,74</b>	<b>1,70</b>	<b>1,57</b>	<b>1,54</b>	<b>1,48</b>

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 1,74 pada tahun 2010 menjadi 1,70 pada tahun 2011. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 1,57 (2012), 1,54 (2013), dan 1,48 (2014). Hal ini terjadi karena adanya penurunan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

#### 4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
b.LNPRT	2.077,10	2.313,83	2.601,07	3.083,42	3.863,84
c.Pemerintah	20.578,07	23.491,34	26.124,21	28.718,94	31.695,13
<b>J u m l a h</b>	<b>122.316,28</b>	<b>139.352,39</b>	<b>158.413,23</b>	<b>180.923,82</b>	<b>210.240,95</b>
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
<b>Proporsi</b>	<b>71,22</b>	<b>70,28</b>	<b>69,39</b>	<b>69,94</b>	<b>70,05</b>

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi. Meskipun konsumsi akhir memiliki kecenderungan semakin menurun, namun proporsinya terhadap PDRB relatif stabil dikisaran 69-71 persen. Artinya produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

#### 4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah sendiri, tetapi diperdagangkan baik ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010–2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Luar Negeri	22.971,62	18.704,08	17.035,86	18.749,51	21.723,59
b. Antar Daerah	35.566,35	38.559,22	41.156,62	38.941,22	50.955,94
Total	58.537,97	57.263,30	58.192,48	57.690,73	72.679,53
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	57.259,19	66.698,22	82.677,07	96.604,57	118.364,52
<b>Rasio Ekspor terhadap PMTB</b>	<b>1,02</b>	<b>0,86</b>	<b>0,70</b>	<b>0,60</b>	<b>0,61</b>

Ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan lebih didominasi lebih dari 60 persen oleh ekspor antar daerah. Pada tahun 2010 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Namun pada periode-periode sesudahnya, nilai ekspor justru lebih rendah dari PMTB (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

#### 4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain maupun negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
Impor (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Luar Negeri	10.394,14	13.458,92	13.500,01	15.332,78	10.961,42
b. Antar Daerah	58.084,54	54.064,29	63.158,73	67.598,38	88.648,68
Total	68.478,68	67.523,21	76.658,74	82.931,16	99.610,10
<b>Rasio PDRB terhadap Impor</b>	<b>2,51</b>	<b>2,94</b>	<b>2,98</b>	<b>3,12</b>	<b>3,01</b>

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 - 2014 terus menunjukkan peningkatan dari 2,51 (2010) menjadi 3,01 (2014), yang artinya dari tahun ke tahun, selama periode 2010 hingga 2014, ketergantungan PDRB Sulawesi Selatan terhadap produk impor semakin berkurang.

#### 4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
%	71,49	74,57	74,40	74,83	75,55
Total nilai Impor ADHB					
(Miliar Rp)	68.478,68	67.523,21	76.658,74	82.931,15	99.610,10
%	28,51	25,40	25,14	24,28	24,92
<u>Total Permintaan Akhir</u> <sup>16</sup> (Miliar Rp)	240.219,42	265.812,29	304.944,21	341.614,11	399.734,32
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 24 - 28 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 240.219,42 miliar (2010) menjadi sebesar 399.734,32 miliar rupiah (2014).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 171.740,74 miliar rupiah (2010); 198.289,08 miliar rupiah (2011); 228.285,47 miliar rupiah (2012); 258.682,96 miliar rupiah (2013); dan 300.124,22 miliar rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 68.478,68 miliar rupiah (2010); 67.523,21 miliar rupiah (2011); 76.658,74 miliar rupiah (2012); 82.931,15 miliar rupiah (2013); dan 99.610,10 miliar rupiah (2014).

<sup>16</sup> Termasuk diskrepansi statistik

#### 4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014**

<b>Uraian</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	58.537,97	57.263,30	58.192,48	57.690,73	72.679,53
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	68.478,68	67.523,21	76.658,74	82.931,15	99.610,10
Net Ekspor (X - M) (Miliar Rp)	-9.940,70	-10.259,91	-18.466,26	-25.240,42	-26.930,57
Rasio Ekspor thdp Impor	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,76</b>	<b>0,70</b>	<b>0,73</b>

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan selalu dalam posisi defisit. Penyebab nilai posisi defisit dikarenakan dominasi nilai impor antar wilayah yang selalu lebih besar dari nilai ekspor antar wilayah, sebaliknya, nilai ekspor luar negeri lebih besar dari impor luar negeri menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Namun karena net ekspor antar wilayah/daerah mempunyai nilai yang lebih besar dari ekspor luar negeri maka posisi neraca perdagangan Sulawesi Selatan menjadi defisit. Defisit perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi antara tahun 2010 sampai



dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar minus 9.940,70 miliar rupiah (2010), minus 10.259,91 miliar rupiah (2011), minus 18.466,25 miliar rupiah (2012), minus 25.240,41 miliar (2013), dan minus 26.930,57 miliar rupiah (2014).

Sementara rasio ekspor terhadap impor masih di bawah 1 dari tahun 2010 - 2014. Pada tahun 2010 dan 2011 rasionya sebesar 0,85, kemudian 0,76 pada tahun 2012, 0,70 pada tahun 2013, dan 0,73 pada tahun 2014.

<http://sulsel.bps.go.id>

#### 4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ( $-1 < RPI < +1$ ). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional,  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	22.971,62	18.704,08	17.035,86	18.749,51	21.723,59
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	10.394,14	13.458,92	13.500,01	15.332,78	10.961,42
(X - M) (Miliar Rp)	12.577,48	5.245,16	3.535,85	3.416,74	10.762,16
(X + M) (Miliar Rp)	33.365,76	32.163,00	30.535,87	34.082,29	32.685,01
RPI	<b>0,38</b>	<b>0,16</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,33</b>

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 - 2014, posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari impor luar negeri. Nilai ekspor luar negeri pada periode tersebut berfluktuatif, namun mulai tahun 2012 cenderung terus meningkat sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 nilai ekspor luar negeri Sulawesi Selatan mencapai 22.971,62 miliar rupiah turun menjadi 17.035,86 miliar rupiah di tahun 2012 dan meningkat menjadi 21.723,59 miliar rupiah pada tahun 2014. Demikian juga nilai impor luar negeri juga mengalami fluktuatif.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2010 - 2014 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio berkisar antara 0,1 hingga 0,3.

#### 4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	171.740,74	185.708,47	202.184,59	217.618,45	234.083,97
Perubahan (Miliar rupiah)	-	13.967,73	16.476,11	15.433,86	16.465,52
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	57.259,19	64.561,92	74.678,05	84.528,48	92.471,79
<b>ICOR</b>	-	<b>4,62</b>	<b>4,53</b>	<b>5,48</b>	<b>5,62</b>

Data di atas menunjukkan besaran ICOR menurun dari sebesar 4,62 (2011) menjadi 4,53 (2012). Kemudian naik kembali pada tahun 2013 menjadi 5,48. Dan terus mengalami peningkatan menjadi 5,62 pada tahun 2014.



<http://sulsel.bps.go.id>

***BAB V***  
***PENUTUP***



1. PDRB menurut penggunaan tahun 2010 - 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 - 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).





<http://sulsel.bps.go.id>

**LAMPIRAN**



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran , Provinsi Sulawesi Selatan**

*(Juta Rupiah)*

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>99,661,110.94</b>	<b>113,547,230.59</b>	<b>129,687,947.32</b>	<b>149,121,466.35</b>	<b>174,681,984.11</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	45,786,447.76	50,363,232.38	57,180,615.21	65,061,509.07	75,391,053.64
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,178,615.55	5,247,098.66	6,031,151.14	7,173,982.13	8,561,105.46
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,371,584.45	10,984,925.83	12,532,840.87	14,869,042.26	17,694,724.93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9,180,201.54	11,331,202.59	13,228,582.45	15,038,381.69	17,989,821.48
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,340,411.45	24,932,584.63	28,186,225.08	32,908,830.94	38,016,892.12
1.f. Hotel dan Restoran	4,635,500.53	5,627,995.65	6,733,306.40	7,512,332.71	9,212,364.95
1.g. Lainnya	4,168,349.65	5,060,190.85	5,795,226.16	6,557,387.55	7,816,021.52
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2,077,095.84</b>	<b>2,313,825.94</b>	<b>2,601,073.78</b>	<b>3,083,417.19</b>	<b>3,863,839.08</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>20,578,073.82</b>	<b>23,491,337.09</b>	<b>26,124,213.22</b>	<b>28,718,940.13</b>	<b>31,695,128.86</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	11,715,022.24	13,515,202.67	14,952,865.04	16,395,837.44	18,055,419.70
3.b. Konsumsi Individu	8,863,051.58	9,976,134.42	11,171,348.18	12,323,102.69	13,639,709.16
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>57,259,192.65</b>	<b>66,698,225.12</b>	<b>82,677,067.85</b>	<b>96,604,565.45</b>	<b>118,364,517.41</b>
4.a. Bangunan	46,779,423.60	54,781,203.30	68,608,446.33	79,869,605.09	96,805,852.47
4.b. Non-Bangunan	10,479,769.06	11,917,021.82	14,068,621.52	16,734,960.36	21,558,664.94
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>2,105,972.49</b>	<b>2,498,378.43</b>	<b>5,661,430.25</b>	<b>6,394,989.98</b>	<b>(1,550,670.11)</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>22,971,620.14</b>	<b>18,704,078.92</b>	<b>17,035,863.86</b>	<b>18,749,514.62</b>	<b>21,723,589.77</b>
6.a. Barang	22,469,792.51	18,144,594.76	16,389,297.83	18,009,633.10	20,978,433.58
6.b. Jasa	501,827.63	559,484.16	646,566.03	739,881.52	745,156.19
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>10,394,137.83</b>	<b>13,458,918.23</b>	<b>13,500,010.87</b>	<b>15,332,777.85</b>	<b>10,961,424.87</b>
7.a. Barang	9,766,108.39	12,775,517.56	12,768,801.27	14,447,904.00	10,360,926.09
7.b. Jasa	628,029.43	683,400.67	731,209.60	884,873.85	600,498.78
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(22,518,183.95)</b>	<b>(15,505,073.04)</b>	<b>(22,002,112.29)</b>	<b>(28,657,156.63)</b>	<b>(37,692,739.56)</b>
8.a. Ekspor	35,566,354.84	38,559,220.11	41,156,616.94	38,941,218.48	50,955,936.54
8.b. Impor	58,084,538.80	54,064,293.15	63,158,729.23	67,598,375.11	88,648,676.10
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)</b>	<b>171,740,744.10</b>	<b>198,289,084.82</b>	<b>228,285,473.12</b>	<b>258,682,959.23</b>	<b>300,124,224.68</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran , Provinsi Sulawesi Selatan**

*(Juta Rupiah)*

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>99.661.110,94</b>	<b>106.351.159,45</b>	<b>113.778.969,66</b>	<b>120.561.213,72</b>	<b>127.699.981,23</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	45.786.447,76	48.124.512,51	51.199.762,12	54.132.897,85	57.212.791,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4.178.615,55	4.472.011,87	4.844.090,48	5.199.517,39	5.596.741,97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9.371.584,45	9.881.860,21	10.541.792,67	11.086.505,95	11.782.462,50
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9.180.201,54	10.027.985,10	11.096.105,77	11.760.378,33	12.476.453,12
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22.340.411,45	24.080.189,17	25.646.426,42	27.336.337,02	28.914.132,01
1.f. Hotel dan Restoran	4.635.500,53	5.089.924,85	5.500.356,38	5.900.107,09	6.366.280,85
1.g. Lainnya	4.168.349,65	4.674.675,74	4.950.435,83	5.145.470,09	5.351.118,82
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2.077.095,84</b>	<b>2.217.828,18</b>	<b>2.376.282,22</b>	<b>2.622.456,27</b>	<b>2.917.635,38</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>20.578.073,82</b>	<b>21.545.387,00</b>	<b>22.451.028,70</b>	<b>23.057.704,19</b>	<b>23.491.724,76</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	11.715.022,24	12.796.623,82	13.193.651,63	13.548.999,11	13.713.898,56
3.b. Konsumsi Individu	8.863.051,58	8.748.763,18	9.257.377,07	9.508.705,08	9.777.826,20
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>57.259.192,65</b>	<b>64.561.918,88</b>	<b>74.678.047,28</b>	<b>84.528.478,35</b>	<b>92.471.788,15</b>
4.a. Bangunan	46.779.423,60	52.621.488,04	61.404.564,79	69.374.064,37	74.837.212,15
4.b. Non-Bangunan	10.479.769,06	11.940.430,84	13.273.482,49	15.154.413,98	17.634.576,00
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>2.105.972,49</b>	<b>2.163.696,61</b>	<b>5.431.187,28</b>	<b>5.452.373,02</b>	<b>(1.375.149,21)</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>22.971.620,15</b>	<b>17.333.112,11</b>	<b>15.533.439,42</b>	<b>16.458.159,74</b>	<b>18.071.268,35</b>
6.a. Barang	22.469.792,52	16.789.475,70	14.940.231,99	15.846.664,87	17.523.797,52
6.b. Jasa	501.827,63	543.636,41	593.207,43	611.494,87	547.470,83
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>10.394.137,83</b>	<b>12.003.479,08</b>	<b>11.106.032,09</b>	<b>12.418.052,42</b>	<b>7.973.670,76</b>
7.a. Barang	9.766.108,39	11.316.117,17	10.433.575,35	11.694.896,32	7.550.415,27
7.b. Jasa	628.029,43	687.361,91	672.456,74	723.156,10	423.255,48
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(22.518.183,96)</b>	<b>(16.461.149,04)</b>	<b>(20.958.334,77)</b>	<b>(22.643.883,95)</b>	<b>(21.219.606,80)</b>
8.a. Ekspor	35.566.354,84	35.522.459,48	35.684.910,12	34.822.722,78	41.005.703,43
8.b. Impor	58.084.538,80	51.983.608,52	56.643.244,90	57.466.606,73	62.225.310,23
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)</b>	<b>171.740.744,10</b>	<b>185.708.474,11</b>	<b>202.184.587,70</b>	<b>217.618.448,92</b>	<b>234.083.971,09</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran , Provinsi Sulawesi Selatan**

*(Persen)*

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	58.03	57.26	56.81	57.65	58.20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	26.66	25.40	25.05	25.15	25.12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.43	2.65	2.64	2.77	2.85
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.46	5.54	5.49	5.75	5.90
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.35	5.71	5.79	5.81	5.99
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13.01	12.57	12.35	12.72	12.67
1.f. Hotel dan Restoran	2.70	2.84	2.95	2.90	3.07
1.g. Lainnya	2.43	2.55	2.54	2.53	2.60
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	1.21	1.17	1.14	1.19	1.29
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	11.98	11.85	11.44	11.10	10.56
3.a. Konsumsi Kolektif	6.82	6.82	6.55	6.34	6.02
3.b. Konsumsi Individu	5.16	5.03	4.89	4.76	4.54
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	33.34	33.64	36.22	37.34	39.44
4.a. Bangunan	27.24	27.63	30.05	30.88	32.26
4.b. Non-Bangunan	6.10	6.01	6.16	6.47	7.18
<b>5. Perubahan Inventori</b>	1.23	1.26	2.48	2.47	(0.52)
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	13.38	9.43	7.46	7.25	7.24
6.a. Barang	13.08	9.15	7.18	6.96	6.99
6.b. Jasa	0.29	0.28	0.28	0.29	0.25
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	6.05	6.79	5.91	5.93	3.65
7.a. Barang	5.69	6.44	5.59	5.59	3.45
7.b. Jasa	0.37	0.34	0.32	0.34	0.20
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	(13.11)	(7.82)	(9.64)	(11.08)	(12.56)
8.a. Ekspor	20.71	19.45	18.03	15.05	16.98
8.b. Impor	33.82	27.27	27.67	26.13	29.54
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran , Provinsi Sulawesi Selatan**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	6.71	6.98	5.96	5.92
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.11	6.39	5.73	5.69
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7.02	8.32	7.34	7.64
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.44	6.68	5.17	6.28
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9.23	10.65	5.99	6.09
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7.79	6.50	6.59	5.77
1.f. Hotel dan Restoran	9.80	8.06	7.27	7.90
1.g. Lainnya	12.15	5.90	3.94	4.00
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	6.78	7.14	10.36	11.26
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	4.70	4.20	2.70	1.88
3.a. Konsumsi Kolektif	9.23	3.10	2.69	1.22
3.b. Konsumsi Individu	(1.29)	5.81	2.71	2.83
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	12.75	15.67	13.19	9.40
4.a. Bangunan	12.49	16.69	12.98	7.87
4.b. Non-Bangunan	13.94	11.16	14.17	16.37
<b>5. Perubahan Inventori</b>	2.74	151.01	0.39	(125.22)
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	(24.55)	(10.38)	5.95	9.80
6.a. Barang	(25.28)	(11.01)	6.07	10.58
6.b. Jasa	8.33	9.12	3.08	(10.47)
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	15.48	(7.48)	11.81	(35.79)
7.a. Barang	15.87	(7.80)	12.09	(35.44)
7.b. Jasa	9.45	(2.17)	7.54	(41.47)
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	(26.90)	27.32	8.04	(6.29)
8.a. Ekspor	(0.12)	0.46	(2.42)	17.76
8.b. Impor	(10.50)	8.96	1.45	8.28
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)</b>	<b>8.13</b>	<b>8.87</b>	<b>7.63</b>	<b>7.57</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)  
Menurut Pengeluaran , Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>2014**</b>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	106.77	113.98	123.69	136.79
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	104.65	111.68	120.19	131.77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	117.33	124.51	137.97	152.97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111.16	118.89	134.12	150.18
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	113.00	119.22	127.87	144.19
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	103.54	109.90	120.38	131.48
1.f. Hotel dan Restoran	110.57	122.42	127.33	144.71
1.g. Lainnya	108.25	117.06	127.44	146.06
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	104.33	109.46	117.58	132.43
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	109.03	116.36	124.55	134.92
3.a. Konsumsi Kolektif	105.62	113.33	121.01	131.66
3.b. Konsumsi Individu	114.03	120.68	129.60	139.50
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	103.31	110.71	114.29	128.00
4.a. Bangunan	104.10	111.73	115.13	129.36
4.b. Non-Bangunan	99.80	105.99	110.43	122.25
<b>5. Perubahan Inventori</b>	115.47	104.24	117.29	112.76
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	107.91	109.67	113.92	120.21
6.a. Barang	108.07	109.70	113.65	119.71
6.b. Jasa	102.92	108.99	121.00	136.11
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	112.13	121.56	123.47	137.47
7.a. Barang	112.90	122.38	123.54	137.22
7.b. Jasa	99.42	108.74	122.36	141.88
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	94.19	104.98	126.56	177.63
8.a. Ekspor	108.55	115.33	111.83	124.27
8.b. Impor	104.00	111.50	117.63	142.46
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)</b>	106.77	112.91	118.87	128.21

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)  
Menurut Pengeluaran , Provinsi Sulawesi Selatan**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>6.77</b>	<b>6.76</b>	<b>8.52</b>	<b>10.59</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.65	6.72	7.62	9.64
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	17.33	6.11	10.82	10.87
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11.16	6.95	12.81	11.97
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	13.00	5.51	7.26	12.76
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.54	6.15	9.54	9.22
1.f. Hotel dan Restoran	10.57	10.71	4.01	13.65
1.g. Lainnya	8.25	8.15	8.86	14.61
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>4.33</b>	<b>4.92</b>	<b>7.42</b>	<b>12.63</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>9.03</b>	<b>6.72</b>	<b>7.04</b>	<b>8.32</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	5.62	7.31	6.77	8.80
3.b. Konsumsi Individu	14.03	5.83	7.39	7.64
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>3.31</b>	<b>7.17</b>	<b>3.23</b>	<b>12.00</b>
4.a. Bangunan	4.10	7.33	3.04	12.36
4.b. Non-Bangunan	(0.20)	6.20	4.19	10.71
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>(6.92)</b>	<b>(10.56)</b>	<b>937.62</b>	<b>(87.17)</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>7.91</b>	<b>1.63</b>	<b>3.88</b>	<b>5.52</b>
6.a. Barang	8.07	1.51	3.60	5.34
6.b. Jasa	2.92	5.91	11.01	12.49
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>12.13</b>	<b>8.41</b>	<b>1.58</b>	<b>11.34</b>
7.a. Barang	12.90	8.40	0.95	11.08
7.b. Jasa	(0.58)	9.37	12.53	15.95
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(8.67)</b>	<b>5.46</b>	<b>91.84</b>	<b>4.08</b>
8.a. Ekspor	9.24	7.88	(16.30)	25.15
8.b. Impor	3.34	4.96	17.10	12.92
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)</b>	<b>6.77</b>	<b>5.75</b>	<b>5.28</b>	<b>7.86</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



<http://sulsel.bps.go.id>

## ***DAFTAR PUSTAKA***



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

17. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125lp. (0411) 854838, Fax. (0411) 851225  
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id> Email: [bps7300@bps.go.id](mailto:bps7300@bps.go.id)